

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi memberikan kemudahan kepada berbagai pihak termasuk perusahaan. Adanya kemudahan ini menuntut perusahaan untuk mengikuti keinginan pasar agar dapat bersaing dengan lingkungan ekonomi yang semakin berkembang. Perkembangan ini telah mengubah tatanan sosial yang semula menggunakan cara-cara tradisional menjadi cara-cara baru yang lebih berbasis teknologi dimana era ini disebut sebagai era disrupsi (Rahmasari et al., 2021). Dalam menghadapi persaingan di era disrupsi yang ketat perusahaan perlu melakukan transparansi dalam mengungkapkan informasi perusahaan dan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang disajikan dengan standar yang berlaku agar terbentuk citra dan persepsi yang baik di masyarakat (Ramdani, 2016). Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, sejumlah besar perusahaan *go public* memilih jasa audit terbaik untuk mendapatkan opini audit yang berkualitas (Permatasari & Astuti, 2018). Maka, dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang andal dan dipercaya tentu diperlukannya suatu jasa profesional yang kompeten dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan (Ivan, 2020).

Auditor adalah pihak yang dianggap tepat untuk menjadi penghubung antara pihak manajemen dan pemangku kepentingan (Rohmah, 2020). Peran auditor juga dapat menilai suatu perusahaan atas pelaporan keuangan yang telah dilakukan dan memberikan pertanggungjawaban atas tidak adanya keterpihakan atau perbedaan informasi yang diberikan perusahaan kepada publik (D. W. Lestari, 2017). Adanya keterlibatan pihak auditor membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami tujuan dan keterbatasan yang ada pada laporan keuangan perusahaan sehingga diharapkan auditor dapat memberikan hasil yang berkualitas meningkatkan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan sebagai akibatnya akan berdampak pada kualitas audit yang berkaitan dengan tampilan profesionalisme, ketekunan dan kehati-hatian oleh auditor dalam proses audit yang

harus mengarah pada penilaian yang benar dan pandangan wajar pada laporan keuangan (Ilechukwu & Ubaka, 2017).

Permasalahan terkait kualitas audit di era disrupsi saat ini menjadi *issue* yang global pada proses audit karena jasa audit saat ini dianggap sebagai jasa yang memiliki *market* yang sangat luas dan tidak hanya di Nasional. Terutama bagi perusahaan dengan jasa audit yang berafiliasi dengan perusahaan Internasional memiliki kemungkinan proses audit di berbagai wilayah negara. Sehingga, konteks kualitas audit di berbagai negara ini bisa saja memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh faktor *market* yang sangat luas. Dari beberapa negara di Asia terdapat 3 negara utama yang memiliki banyak industri yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Indonesia, Malaysia dan Thailand termasuk ke dalam beberapa negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang menjadi incaran investasi para investor karena posisi yang strategis di Selat Malaka yang dimana merupakan lalu lintas perdagangan internasional, pengembangan potensi ekonomi dan pengembangan lebih lanjut, stabilitas politik, dan pertumbuhan PDB yang stabil dari tahun ke tahun (Febriyanti & Gunawan, 2016). Tetapi pada faktanya, terdapat permasalahan pada 3 negara tersebut mengenai tidak konsistennya akuntan publik dalam memberikan kualitas audit yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku atau melakukan kecurangan meskipun termasuk ke dalam negara yang menjadi incaran para investor.

Berdasarkan *press release* yang disampaikan OJK dalam SP 26/DHMS/OJK/VI/2019, terdapat kasus pada laporan tahunan PT. Garuda Indonesia tahun 2018 yang dinyatakan keliru setelah diketahui bahwa PT. Garuda Indonesia tidak mencatatkan pendapatan terkait kerjasamanya dengan PT. Mahata Aero Teknologi untuk pembayaran yang diterima PT. Garuda Indonesia setelah berakhirnya kontrak dan berdampak pada laporan laba rugi. Hal ini ditindaklanjuti oleh kementerian keuangan yang dimana menemukan kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik Kasner Sirumapea dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Dimana pihak akuntan publik telah melanggar atas SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dimana mempengaruhi opini laporan auditor independen. Selain itu terdapat permasalahan lain yang dilansir pada laporan di

Shifa Miarti Aziza, 2023

PENGARUH RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI TERHADAP AUDIT FEE DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

laman *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, yang dimana pihak OJK memberikan sanksi kepada KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja yang merupakan partner dari Ernst and Young (EY). Hal ini dikarenakan KAP tersebut telah melakukan pelanggaran audit dalam Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Dimana pihak KAP tidak cermat dan teliti dalam melakukan prosedur audit terkait salah saji material pada PT. Hanson International Tbk.

Di Malaysia, terdapat kasus yang menempatkan Malaysia pada tahap aib di mata dunia bisnis dan *auditing* yaitu skandal 1MDB (*1 Malaysia Development Berhad*) yang dimana kasus tersebut menyeret dua firma audit besar (KPMG dan Deloitte) dan dimana laporan auditor untuk 1MDB tidak valid karena kedua auditor menarik jaminan yang diberikan untuk laporan keuangan yang di audit. Sehingga, Komisi Sekuritas Malaysia telah menegur dan mendenda firma audit karena gagal menghasilkan laporan auditor yang memenuhi syarat (Ganesan et al., 2019). Dalam beberapa tahun terakhir, kecurangan dalam laporan keuangan juga sering terjadi di Thailand. Seperti *Picnic Corporation Public Company Limited* yang salah melaporkan pendapatan dengan mencatatkan deposit tangki bensin sebagai pendapatan. *Power-P Public Company Limited* juga melaporkan pendapatan yang belum direalisasi. Tindakan tersebut disebabkan oleh manipulasi angka dalam laporan keuangan yang menyebabkan ketidakberlanjutan dan batas pertumbuhan bisnis. Karena kasus ini, *Securities and Exchange Commission* (SEC) Thailand memutuskan untuk melakukannya merevisi laporan keuangan (Sawangarrearak & Thanathamthee, 2021).

Insiden tersebut tentu memberikan kekhawatiran bagi masyarakat terutama pada era disrupsi saat ini yang dimana setiap kecurangan serta kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih banyak tereksplor oleh berbagai pihak sehingga menghilangkan kepercayaan atas hasil pemeriksaan auditor (G. Cahyani & Zulvia, 2019). Di era disrupsi saat ini tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh auditor. Banyaknya tuntutan serta tantangan terhadap auditor akan menekan auditor untuk memiliki pengetahuan tentang teknologi dan informasi dalam menghadapi persaingan di era disrupsi (Rahmasari et al., 2021). Dimana

Shifa Miarti Aziza, 2023

PENGARUH RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI TERHADAP AUDIT FEE DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tingkat dari kualitas atau kinerja auditor dapat dilihat dari pengetahuan yang dimilikinya. Untuk mencapai kualitas audit yang baik juga, auditor harus mengacu pada SPAP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) terdiri dari Pernyataan Standar Auditing, Pernyataan Standar Atestasi, Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review*, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi, dan Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (Via, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi auditor untuk meningkatkan kualitas audit perusahaan adalah audit fee. Audit fee dapat dikatakan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan dalam hal ini berupa luas jasa audit yang diberikan oleh klien kepada auditor (Fauzan et al., 2021). Kebijakan mengenai penetapan audit fee di Indonesia diatur dalam KEP.024/IAPI/VII/2008 dan berlaku hingga saat ini sebagai acuan dari besaran audit fee. Di Malaysia, semua auditor diwajibkan untuk mematuhi panduan yang direkomendasikan oleh *The Malaysian Institute of Accountants* (MIA) pada tahun 2010 yang menerbitkan *Recommended Practice Guide 7* (Revisi) tentang pembebanan audit fee. Sedangkan penentuan audit fee di Thailand bergantung pada ukuran bisnis dan ruang lingkup pekerjaannya, besarnya audit fee di Thailand mulai dari 25.000 Baht per tahun. Meskipun terdapat acuan yang menjelaskan terkait penetapan fee tetapi pihak klien dan auditor tetap harus melakukan kesepakatan untuk menghindari perang tarif yang dapat merusak kredibilitas auditor (Yustari et al., 2021). Menurut Ng dan Tan dalam Purba (2013) mengungkapkan bahwa tinggi atau rendahnya audit fee menempatkan kedilemaan bagi pihak auditor. Di satu sisi, auditor harus independen dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan karena berkaitan dengan kepentingan banyak pihak tetapi sisi lainnya auditor juga perlu memenuhi keinginan atau tuntutan klien yang membayar jasanya yang dimana pembayaran atas jasanya merupakan sumber penghasilan bagi auditor (Prabhawanti & Widhiyani, 2018). Posisi tersebut menempatkan auditor pada situasi dilematis yang dapat mempengaruhi kualitas audit (Salsabila, 2018). Semakin tingginya fee audit maka kualitas audit akan semakin tinggi dibandingkan dengan audit fee yang rendah (Risma, 2019).

Shifa Miarti Aziza, 2023

PENGARUH RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI TERHADAP AUDIT FEE DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian Nkemjika et al. (2017), Yahaya & Onyabe (2022), dan Kuntari et al. (2017) mengungkapkan bahwa audit fee memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Menurut Ibrahim & Ali (2018) audit fee merupakan penentu penting kualitas audit maka perlu diperhitungkan saat mengusulkan adanya audit. Dengan membayar audit fee yang lebih tinggi, perusahaan akan mengharapkan auditor dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh dan rinci dengan selalu memperhatikan standar dan prosedur yang sesuai dan tidak ada prosedur yang terlewatkan (Ayu et al., 2019). Ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa profesional yang diajukan sangat rendah sehingga berdampak pada kualitas audit yang tidak sesuai (Wiguna et al., 2019).

Berbeda dengan penelitian Ilechukwu & Ubaka (2017), Jung et al. (2016) dan Muslim et al. (2020) menunjukkan bahwa audit fee tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi audit fee, prosedur audit yang lebih luas akan dilakukan oleh seorang auditor tetapi tidak menjamin bahwa hasil audit dapat diandalkan dan akurat (Meidawati & Assidiqi, 2019). Hal ini dikarenakan premi audit fee merupakan faktor yang signifikan dalam konteks independensi auditor yang dapat dikompromikan dengan klien dan kualitas audit tidak berkurang ketika daya tawar klien kuat (Krauß et al., 2015). Dimana penetapan audit fee yang tidak normal atau tidak sesuai dapat menurunkan kualitas audit karena mempengaruhi independensi auditor yang dimana dapat melakukan praktik-praktik yang dilarang untuk meningkatkan kualitas audit (Ridzky & Fitriany, 2022). Selain itu, pemberian audit fee tidak dapat memprediksi baik atau tidaknya kualitas audit karena kualitas audit dilihat dari sikap independen seorang auditor (Yanti & Wijaya, 2020).

Auditor yang bekerja secara profesional dan mempunyai kinerja yang andal akan menawarkan bayaran yang sesuai dengan tingkat risiko dari pekerjaannya (Ardani, 2017). Risiko dalam proses audit berarti dalam melakukan audit, auditor menentukan adanya ketidakpastian terkait bukti audit, efektivitas struktur pengendalian internal klien dan laporan keuangan yang telah di audit disajikan secara wajar (Muslim et al., 2020). Terutama pada era disrupsi saat ini, adanya pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik yang dapat menimbulkan risiko

Shifa Miarti Aziza, 2023

PENGARUH RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI TERHADAP AUDIT FEE DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

baru terkait dengan ancaman *cybercrime* dan pengamanan aset negara dalam rangka perlindungan dan pengelolaan aset. Maka peran pengendalian internal sangat penting karena perlu adanya pihak manajemen yang dapat mengontrol agar dapat memastikan integritas dari data dan sistem informasi berjalan dengan baik dan mengurangi risiko yang ada (Panuntun, 2020). Dalam salah satu standar audit, auditor diwajibkan untuk melakukan penafsiran risiko dari pemahaman lingkup bisnis perusahaan (Kushasyandita, 2012). Penafsiran risiko yang auditor perlu lakukan adalah melihat kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan apakah terbebas dari salah saji material yang disebabkan oleh *error* dan *fraud* (Rakbandiah, 2020). Hal yang dapat auditor lakukan dalam menafsirkan risiko yaitu dengan memahami pengendalian internal yang memadai atau tidaknya pada suatu perusahaan (Rumapea & Riana Simamora, 2018).

COSO memandang pengendalian internal sebagai serangkaian tindakan yang mencakup seluruh proses dalam suatu organisasi. Pengendalian internal adalah bagian dari proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan (Makikui et al., 2017). Pengendalian internal berbasis COSO terdiri dari lima komponen pengendalian yang saling berhubungan. Pertama, lingkungan pengendalian menjelaskan seperangkat standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk membawa pengendalian internal di seluruh organisasi. Berdasarkan *Institute of Internal Auditors* (IIA), sebuah lingkungan pengendalian adalah fondasi di mana sistem internal yang efektif dibangun dan dioperasikan dalam sebuah organisasi yang berusaha untuk mencapai tujuan strategisnya serta menjaga aktivitya (Schandl & Foster, 2019). Maka dalam penelitian ini aspek lingkungan pengendalian dinilai melalui indikator kepemilikan institusional. Hal ini dikarenakan besarnya kepemilikan institusional akan berdampak pada efisiensi aset atau aktiva perusahaan yang dapat digunakan sehingga memiliki efek membatasi manajemen yang boros (Dewi & Abundanti, 2019). Terlebih lagi era disrupsi ini tentu memaksa perusahaan untuk lebih efisien dan selektif dalam melakukan aktivitas agar tujuan perusahaan dapat terwujud.

Kedua, penilaian risiko membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa

akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian dari tujuan organisasi (Schandl & Foster, 2019). Penelitian ini menilai aspek penilaian risiko dengan indikator risiko litigasi yang berfokus pada kewajiban kontinjensi. Dimana kewajiban kontinjensi menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* merupakan serangkaian situasi yang ada meliputi ketidakpastian atas memperoleh *gain contingency* atau *loss contingency* dalam suatu perusahaan yang akhirnya dapat menyelesaikan satu atau lebih kejadian yang terjadi atau tidak terjadi masa depan (Akhmadi et al., 2022). Selain itu, kewajiban kontinjensi merupakan aspek risiko yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas yang tentunya dapat berdampak buruk pencapaian tujuan perusahaan.

Ketiga, aktivitas pengendalian adalah tindakan yang membantu manajemen memitigasi risiko untuk memastikan pencapaian tujuan (Schandl & Foster, 2019). Aktivitas pengendalian internal adalah prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya tujuan perusahaan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko (BPKP, 2014). Dalam mengembangkan aktivitas pengendalian, perusahaan perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara kegiatan pengendalian yang bersifat detektif dengan preventif. Aktivitas pengendalian yang didominasi oleh pengendalian preventif di era disrupsi seperti lalu lintas transaksi bisnis yang semakin rumit tentu akan mengganggu kelancaran kegiatan transaksi bisnis perusahaan sehingga diperlukannya pengendalian yang dapat meminimalisir hal tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator jumlah investasi *software* dalam aspek aktivitas pengendalian untuk dapat memberikan kemudahan serta keamanan dalam menjaga transaksi bisnis yang dapat mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan perusahaan.

Keempat, informasi dan komunikasi. Informasi diperoleh atau dihasilkan oleh manajemen baik dari sumber internal maupun eksternal guna mendukung komponen pengendalian internal. Komunikasi berdasarkan sumber internal dan eksternal digunakan untuk menyebarluaskan informasi penting di seluruh dan di luar perusahaan, sebagaimana diperlukan untuk menanggapi setiap kegiatan (Schandl & Foster, 2019). Penelitian ini menggunakan indikator *corporate social responsibility (CSR) disclosure* untuk aspek informasi dan komunikasi. Pada era

Shifa Miarti Aziza, 2023

PENGARUH RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI TERHADAP AUDIT FEE DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disrupsi saat ini, perusahaan harus memastikan terjalannya komunikasi internal dan eksternal yang efektif terutama yang memberikan dampak signifikan terhadap proses bisnis perusahaan. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, perusahaan perlu memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pengguna laporan keuangan sehingga indikator *corporate social responsibility (CSR) disclosure* diharapkan dapat menjadi indikator yang dapat dikaitkan dengan aspek informasi dan komunikasi.

Kelima, pemantauan atas pengendalian adalah evaluasi berkala atau berkelanjutan untuk memverifikasi bahwa masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol yang mempengaruhi prinsip-prinsip di dalamnya (Schandl & Foster, 2019). Pada bagian pemantauan tentu perlu adanya komunikasi berbagai pihak yang terkait untuk mengambil tindakan perbaikan (BPKP, 2014). Penelitian ini memproksikan jumlah rapat sebagai indikator penilaian pada aspek pemantauan atas pengendalian. Hal ini dikarenakan jumlah rapat dapat menjadi suatu penilaian evaluasi yang memusatkan secara langsung kepada segala penyimpangan dalam pemantauan pengendalian internal baik yang akan berlangsung atau yang telah berjalan. Meskipun jumlah rapat tidak berkaitan langsung dengan teknologi tetapi pertumbuhan perusahaan di era disrupsi tentu akan menyebabkan arus komunikasi menjadi semakin cepat sehingga dibutuhkan evaluasi atas pengendalian internal yang berfokus kepada aktivitas dalam proses bisnis di perusahaan.

Pengendalian internal yang sempurna secara efektif menghambat perilaku oportunistik manajer dan meningkatkan akurasi serta keandalan data keuangan (Clinton et al., 2014). Informasi pengendalian internal terkait dengan laporan keuangan dan tidak terkait dengan laporan keuangan diharapkan memainkan peran pelengkap dalam membantu auditor membentuk dasar untuk menilai risiko audit perusahaan (Ji et al., 2018). Maka dari itu, perusahaan membutuhkan pengendalian internal yang baik untuk meminimalkan kesalahan dan risiko yang terjadi pada proses transaksi bisnis (Wijono, 2012). Pengendalian yang buruk menyebabkan audit fee yang lebih tinggi tetapi pengendalian kualitas yang lebih baik pada audit

Shifa Miarti Aziza, 2023

PENGARUH RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL DI ERA DISRUPSI TEKNOLOGI TERHADAP AUDIT FEE DAN IMPLIKASINYA PADA KUALITAS AUDIT (KAJIAN LINTAS NEGARA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

internal dapat mengurangi biaya (JI, 2017). Pengendalian audit internal yang lemah dapat mempengaruhi risiko audit yang mengakibatkan peningkatan jam kerja audit dan audit fee (Oksaviani & Laksito, 2021). Menurut Elder dalam Mat Zain et al. (2015) bahwa auditor menggunakan serangkaian strategi untuk menanggapi dan mengelola risiko pengendalian klien dan dengan meningkatnya risiko pengendalian klien, auditor cenderung meningkatkan audit fee.

Mitra et al. (2017), Prasad et al. (2021), Ganda Saputra & Yusuf (2019), dan Rahayu (2017) meneliti risiko pengendalian internal terhadap audit fee dan menemukan hubungan positif serta signifikan karena semakin banyak risiko pengendalian internal yang dimiliki perusahaan semakin tinggi audit fee yang akan dikenakan. Se jauh risiko kesalahan dan ketidakberesan yang tinggi pada prosedur audit normal tidak dapat mengurangi risiko ke tingkat yang dapat ditoleransi, premi ditambahkan ke biaya untuk mengkompensasi auditor atas perubahan tingkat keparahan dalam masalah pengendalian internal (Jiang & Son, 2015).

Selain itu, penelitian Ji et al. (2018) menemukan bahwa risiko pengendalian internal yang kurang terkontrol dalam bidang yang tidak terkait dengan pelaporan keuangan atau bidang yang tidak terkait dengan akuntansi memiliki efek yang lebih besar pada audit fee. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salehi et al. (2020) dan Fadhil Izzani & Khafid (2022) menyatakan bahwa risiko pengendalian internal berhubungan negatif dengan audit fee. Lingkungan operasi perusahaan yang baik sangat membantu auditor dalam melakukan audit serta auditor yang profesional tentu tidak akan terpengaruh oleh keadaan perusahaan sehingga risiko audit tidak mempengaruhi audit fee (Yusica & Sulistyowati, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melihat pengaruh risiko pengendalian internal di era disrupsi teknologi terhadap audit fee dan bagaimana diantara keduanya berdampak pada kualitas audit. Dimana diantara ketiga variabel terdapat kesinambungan yang berhubungan langsung kepada auditor serta para pemangku kepentingan dalam menentukan sebuah keputusan dalam penentuan audit fee bagi auditor dan keputusan investasi bagi pemangku kepentingan. Selain itu juga, penelitian ini akan membahas secara komprehensif terkait dengan risiko

pengendalian internal, audit fee, dan kualitas audit yang diambil dari lintas negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Risiko sebagai salah satu aspek yang diperhitungkan auditor dalam menilai sebuah perusahaan dan penetapan audit fee yang akan diberikan sedangkan dampak pada kualitas audit dapat berguna bagi para pemangku kepentingan yang dimana dapat digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
2. Bagaimana pengaruh litigasi terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
3. Bagaimana pengaruh jumlah investasi *software* terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
4. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility (CSR) disclosure* terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
5. Bagaimana pengaruh jumlah rapat terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
6. Bagaimana pengaruh audit fee terhadap kualitas audit pada perusahaan fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
8. Bagaimana pengaruh litigasi terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?

9. Bagaimana pengaruh jumlah investasi *software* terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
10. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility (CSR) disclosure* terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?
11. Bagaimana pengaruh jumlah rapat terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
2. Untuk mengetahui pengaruh litigasi terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah investasi *software* terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility (CSR) disclosure* terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat terhadap audit fee pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
6. Untuk mengetahui pengaruh audit fee terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
8. Untuk mengetahui pengaruh litigasi terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

9. Untuk mengetahui pengaruh jumlah investasi *software* terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
10. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility (CSR) disclosure* terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
11. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat terhadap kualitas audit pada perusahaan publik sektor non-keuangan di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh risiko pengendalian internal di era disrupsi teknologi terhadap audit fee dan implikasinya pada kualitas audit pada 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik secara keilmuan serta empiris dan melatih kemampuan diri dalam menganalisis suatu fenomena yang terjadi secara sistematis.

b) Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan dalam pentingnya mengontrol risiko yang ada pada perusahaan karena dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan audit fee yang diberikan auditor. Selain itu, hasil audit yang dilakukan oleh auditor dapat memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam memutuskan investasinya.

c) Bagi Investor

Dapat memberikan informasi terkait pengaruh risiko pengendalian internal terhadap audit fee dan bagaimana dampaknya akan kualitas audit. Sehingga dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kreditur dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.